



Arnawa Bersaksi untuk Mantan Kadiv PT Adhi Karya ✓

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Kadis PU Karangasem Ir. Wayan Arnawa yang juga terdakwa (sudah divonis dua tahun penjara di PT) bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, Imam Wijaya Santosa, Selasa (4/8) kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Haryadi itu, dijelaskan, bahwa saksilah yang menetapkan pemenang lelang atas usulan panitia.

Mengapa menetapkan Adhi Karya? tanya hakim. Arnawa mengatakan, "Saya memanggil ketua dan sekeratis panitia. Dan itu yang menjadi pemenang," sebutnya.

Bagaimana dengan kualitas pipa? Arnawa mengatakan, kualitasnya SII ukuran medium. Ada yang ukurannya diameter 150 mili dan lain-lain. Hakim mencoba mengejar di tahun 2010, ada penunjukan langsung, padahal nilai kontrak Rp 3 miliar. Saksi mengatakan, pekerjaan yang berlanjut, bisa dilakukan petunjuk langsung. Bahkan, itu sudah dilaporkan dan dimintakan pendapat dari BKP dan Dinas PU dapat surat dan diizinkan.

Arnawa menambahkan, awalnya memang dapat sanggahan dari PT Waskita atas dimenangkannya Adhi Karya. Dan itu sudah dijawabnya. Arnawa menyatakan, jika gugurnya PT Waskita Karya sudah sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. "Penentuan gugurnya PT Waskita Karya sebagai pemenang sudah sesuai aturan," jelasnya.

Selain itu, Arnawa menyebut alasan lain-

nya dalam gugurnya PT Waskita Karya yang merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini. Ia mengatakan, sempat membaca salah satu media massa yang menyatakan jika ada dua Direktur Utama di PT Waskita Karya yang diberhentikan karena melakukan penggelapan dan pemalsuan dokumen hingga merugikan perusahaan Rp 500 miliar. "Ini disampaikan langsung oleh Sekertaris BUMN waktu itu," tegasnya.

Hakim anggota, Achmad Peten Sili lalu mengejar Arnawa terkait keputusannya menggugurkan PT Waskita Karya sebagai pemenang lelang yang disebut terlalu subjektif. Malah Peten Sili berkelakar tidak akan menggunakan Arnawa sebagai Kadis PU jika menjadi bupati. "Kalau saya bupati, saya tidak akan pakai kamu. Apalagi koran yang kamu percaya," ujar Peten Sili.

Selain itu, Arnawa juga sempat menjelaskan soal penunjukan langsung PT Adhi Karya dalam pengerjaan proyek lanjutan di tahun 2010 yang menganggarkan dana Rp 3 miliar lebih. Arnawa mengatakan, penunjukan langsung tersebut didasarkan atas pengerjaan proyek sebelumnya di tahun 2009 yang sudah diselesaikan PT Adhi Karya 85 persen. Untuk menghindari kegagalan proyek tersebut, maka pihaknya menunjuk PT Adhi Karya untuk kembali mengerjakan proyek lanjutan di 2009 yang menganggarkan Rp 29 miliar. "Memang ada penunjukan langsung. Tetapi, itu sudah sesuai aturan dan konsultasi dengan BPKP," tegasnya. (kmb37)



BERSAKSI - Asisten II Sekkab Karangasem Ir. Wayan Arnawa yang menjadi saksi memberikan keterangan dalam sidang dugaan korupsi pipanisasi di Kabupaten Karangasem dengan terdakwa Imam Wijaya Santosa, Selasa (4/8) kemarin.



Belum Jelas, Nasib Pengadaan VAR

Gianyar (Bali Post) -

Proses pengadaan Vaksin Anti-Rabies (VAR) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar belum membuahkan hasil. Sampai saat ini, proses pengadaan masih tersendat lantaran minimnya stok VAR di pihak produsen.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, I Wayan Adi Sudiarsana, yang dimintai konfirmasi Selasa (4/8) kemarin, mengungkapkan, Pemkab Gianyar sejauh ini telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan VAR. Akan tetapi lantaran ada kendala yang dihadapi produsen, pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak. "Ibaratnya, uang kita banyak, tapi tidak bisa dibelanjakan," katanya.

Menurutnya, Dinas Kesehatan Gianyar telah berkali-kali menghubungi pihak produsen di Jakarta untuk mempertanyakan masalah tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang pihak produsen belum juga memberikan kepastian kapan Gianyar akan mendapatkan VAR. "Kami terus minta ke pabriknya. Tiap hari kami telepon. Jawabannya tetap sama, masih belum ada," ujar Adi.

Guna menyalahi kondisi tersebut, pihaknya kembali mengatakan, penanganan pasien gigitan anjing dengan VAR dilakukan secara selektif. Dalam artian, mengutamakan pasien diduga tergigit anjing yang positif rabies. Pemkab Gianyar telah berkoordinasi dengan daerah lainnya di Bali yang sampai saat ini masih memiliki stok VAR guna menangani pasien dimaksud. "Kalau ada kasus gigitan, kita tunggu proses. Kalau benar positif, maka pasien akan mendapatkan suntikan VAR," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Cahyani, saat dimintai konfirmasi pertengahan bulan lalu, mengungkapkan kesulitan melakukan pengadaan VAR lantaran secara umum stok VAR mengalami kelangkaan bahkan di tingkat produsen. Pemkab Gianyar telah mengalokasikan Rp 1,2 miliar di APBD 2015 untuk pengadaan VAR. Soal jumlah stok ideal untuk Gianyar, pihaknya menyebut tidak ada angka khusus. Dia beralasan, jumlah ideal stok VAR adalah semua pasien bisa terfasilitasi. (kmb25)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 9



Kasus Dermaga Gunaksa Tim Sebelas Tak Tersentuh, Kejaksaan Dituding Tebang Pilih

Semarapura (Bali Post) -

Kejari Klungkung dituding tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa. Panitia Pengadaan Tanah atau Tim Sembilan dijerat hanya karena kesalahan memberikan tanda tangan sebagai persetujuan penentuan harga. Sementara Tim Sebelas yang memiliki peran hampir sama dan diduga terlibat dalam pusaran kasus ini, sama sekali belum tersentuh.

Ketua Komnas Penyelamat Aset Negara (PAN) Kabupaten Klungkung Made Raka Adnyana, Selasa (4/8) kemarin, mengatakan, para pejabat dan mantan pejabat yang tidak tersentuh di Tim Sebelas patut dipertanyakan. Logikanya, jika Tim Sembilan terjerat dalam perkara ini, seharusnya Tim Sebelas pun ikut terjerat, karena dinilai memiliki peran, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kalau Kejari Klungkung serius membersihkan praktik korupsi di Bumi Serobotan, pihaknya meminta Tim Sebelas juga harus dijerat.

Kasus Dermaga Gunaksa kini sudah menjadi perhatian semua pihak. Jadi, kejaksaan tidak bisa membodohi

masyarakat Klungkung yang ingin penanganan kasus ini dilakukan hingga tuntas. "Ini kan motifnya sama. Kalau Tim Sembilan terjerat, Tim Sebelas juga harus dijerat. Kenapa mereka masih bebas berkeliaran," ujar Raka Adnyana.

Tim Penaksir juga disebut Tim Sebelas karena beranggotakan 11 orang. Namun, satu sudah meninggal (alm), yakni Gusti Ngurah Buana, mantan Kasubag Tugas Bagian Pemerintahan. Tim ini dibentuk sesuai Keputusan Bupati Nomor 321 Tahun 2007 tertanggal 15 November.

Kajari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo mengungkapkan alasan kenapa tidak menjerat Tim Sebelas. Ia

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 10



Sambungan - - -



Bali Post/kmb31

Made Raka Adnyana

menegaskan, saat pejabat dan mantan pejabat dalam Tim Sebelas diperiksa, pihaknya memastikan mereka tidak terlibat. Usai penyelidikan, sebagian besar pejabat dan mantan pejabat justru tidak tahu menjadi bagian dari Tim Sebelas. "Namanya tidak terlibat, masa kami paksa menjerat mereka. Tidak boleh

menzalimi orang yang tidak bersalah," terangnya.

Artinya, Tim Sebelas tidak dilibatkan dalam proses penaksiran harga tanah yang akan dibebaskan dan selanjutnya mendapat ganti rugi dari pemerintah daerah. Padahal, melakukan taksiran harga adalah tugas Tim Sebelas saat itu. Proses penaksiran harga tanah justru dilakukan Tim Sembilan dan bupati saat itu. "Itulah sebabnya, mereka tidak terjerat. Sebab, mereka Tim Penaksir harga, tapi tidak melakukan penaksiran harga," kilah Totok.

Meski demikian, pihaknya memastikan tidak menutup kemungkinan kasus ini berkembang, sesuai hasil dari persidangan. Saat ini ada dua pejabat aktif dalam Tim Sebelas, yaitu Putu Gede Winastra yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda dan akan segera dilantik menjadi Sekda Klungkung pada 10 Agustus nanti, serta Komang Susana yang sekarang menjabat sebagai Kepala BKD Klungkung. (kmb31)



Kasus GOR Nusa Penida

Sudiarkajaya Bungkam, Bupati Tantang Beber Identitas Tersangka

Semarapura (Bali Post) -

Penetapan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Nusa Penida, mengagetkan seluruh pejabat di Kabupaten Klungkung. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta pun harus angkat bicara. Bupati menantang pihak Kejari Klungkung membeberkan identitas kedua tersangka. Sementara Made Sudiarkajaya yang saat itu bertindak sebagai penanggung jawab, memilih bungkam.

Sudiarkajaya diketahui menjabat sebagai Camat Nusa Penida saat proyek ini dikerjakan. Ia juga bertindak sebagai pimpinan proyek (pimpro) sekaligus penanggung jawab. Namun, apakah dirinya yang dimaksud Kajari Klungkung Totok Bambang Spto Dwijo sebagai tersangka, belum terkonfirmasi. Sebab, kajari hanya mengungkapkan dua

tersangka itu bertindak sebagai pimpro dan perencana, tanpa berani menyebut nama terang dan identitas.

Sudiarkajaya yang dihubungi Selasa (4/8) kemarin, memilih bungkam, ketika berita ini ramai menjadi buah bibir masyarakat Klungkung. Dikontak via telepon genggamnya, ia mengaku masih rapat dengan Komisi I DPRD Klungkung. Padahal, pejabat asal Nusa Penida yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu ini, sudah selesai rapat dengan Komisi I. "Rapatnya sudah selesai tadi. Rapat cuma 30 menit," kata Ketua Komisi I Komang Suantara.

Sementara itu, Bupati Nyoman Suwirta mengungkapkan, para pejabat di Klungkung semakin ketakutan karena semakin banyak terjerat kasus hukum. Ia me-

nyayangkan informasi yang disampaikan setengah-setengah. Membuka kasus, tetapi menyembunyikan identitas tersangka, membuat para pejabat makin resah. "Kalau momennya sudah tepat, silakan sampaikan secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Ini menimbulkan ketakutan dan mengganggu birokrasi," tegasnya.

Ketua LSM Barisan Indonesia (Barindo) Klungkung Tjokorda Raka Parta Wijaya juga sangat menyayangkan tidak dibukanya secara gamblang identitas tersangka. Apalagi, para tersangka tidak ditahan pihak kejaksaan. Semestinya tidak ada alasan bagi penyidik tidak menahan tersangka, terlebih sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup. Kalau dibiarkan berkeadilan, siapa yang menjamin tersangka tidak akan menghi-

langkan barang bukti.

"Apa kejaksaan bisa mengawasi tersangka selama 24 jam. Jangan ada yang ditutupi. Penanganannya harus transparan," ujar Raka Parta Wijaya. Sebagai LSM, pihaknya meminta penyidik tidak tebang pilih menangani kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Nusa Penida.

Sebelumnya, Kajari Klungkung Totok Bambang Spto Dwijo mengatakan, sudah menetapkan dua tersangka. Keduanya bertindak sebagai pimpro dan perencana. Namun, ia menolak menyebut identitas dan inisial tersangka, dengan alasan agar tidak mengganggu kinerjanya sebagai PNS. Alasan ini cukup aneh. Sebab, dalam menangani kasus-kasus sebelumnya, ketika sudah ada dua alat bukti yang cukup, identitas tersangka pasti dibuka. (kmb31)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 10



KKP dan KPK Perbaiki Tata Kelola Sektor Kelautan

Denpasar (Bali Post) -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola sektor kelautan Indonesia secara lestari dan berkelanjutan. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Indonesia Sektor Kelautan di Kuta, Badung, Selasa (4/8) kemarin.

"Hal ini merupakan nilai plus dan faktor pembeda antara KPK dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Monev GNP-SDA di 34 provinsi melibatkan 19 Kementerian dan 7 lembaga terkait. Kegiatan ini juga dikatakan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani 19 Maret lalu di Istana Negara. Pada tataran pemerintah provinsi, tindak lanjut atas kajian KPK ini meliputi empat fokus area. "Yakni, penyusunan tata ruang laut wilayah, penataan perizinan kelautan dan perikanan, pelaksanaan kewajiban para pihak serta pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat," imbuh Susi.

Pihaknya telah melakukan sejumlah upaya terkait empat fokus area tersebut. Di antaranya, pembentukan satgas illegal *fishing*, verifikasi dan evaluasi pelaku usaha perikanan, penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan usaha perikanan, pelimpahan kewenangan perpanjangan kapal ukuran >30-60 GT kepada UPT dan provinsi. "Saat ini kami juga sedang melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak," ungkap Susi.

Dari beberapa upaya tersebut, KKP berhasil melakukan verifikasi kapal ikan eks asing sebanyak 1132 unit, penenggelaman 42 unit kapal dan pengalihan pengelolaan kawasan taman laut dari KLHK ke KKP. (kmb32)



Pengiriman Sampah ke Bangli Diprotes ✓ Pemkab Rencanakan Revitalisasi TPA Sente

Semarapura (Bali Post) –

Keberatan warga Bangli terhadap kiriman sampah dari Klungkung yang dibuang di TPA Regional di Desa Landih, mendapat respons cepat dari Bupati Nyoman Suwirta. Selasa (4/8) kemarin, bupati asal Nusa Penida ini langsung menggelar rapat dengan Plt. Kadis DKP Wayan Sumarta di ruangannya.

Setelah ditelusuri, ternyata Klungkung tidak ikut tanda tangan dalam kesepakatan bersama untuk menggunakan TPA Regional di Landih. Padahal, kesepakatan bersama tersebut melibatkan empat kabupaten, yakni Gianyar, Bangli, Karangasem, dan Klungkung.

Bupati Suwirta tidak mengetahui secara pasti alasan Klung-

kung tidak melakukan tanda tangan di kesepakatan tersebut. Yang jelas kesepakatan tersebut dibuat 2010, sebelum dirinya menjabat sebagai bupati. Ia mengaku telah memerintahkan Plt. Kadis DKP melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali untuk meninjau kesepakatan tersebut.

Pihaknya akan melakukan revitalisasi terhadap TPA di Sente, Pikat, Dawan, yang sekarang belum ditutup secara total. Apalagi, sudah disender untuk mencegah banjir dan sampah berserakan di jalan serta masuk ke lahan warga.

Untuk mengatasi persoalan sampah, bupati mengaku akan melakukan studi banding ke Tangerang, Jawa Barat,

yang telah berhasil menangani sampah menggunakan mesin *incinerator*. Satu mesin *incinerator* dapat mengolah sampah 48 meter kubik dalam waktu 16 jam. Semua sampah diolah menjadi pupuk dan plastik. Akan tetapi harga mesin *incinerator* cukup mahal. Per unitnya disebut-sebut mencapai Rp 2 miliar lebih. Padahal, Klungkung idealnya memerlukan empat unit mesin, mengingat volume sampahnya mencapai 212 meter kubik per hari. "Volume sampah ini belum termasuk saat hari raya," kata Suwirta.

Bupati yang didampingi Plt. Kadis DKP dan Kabag Humas Wayan Parna, yakin masyarakat Klungkung mendukung pemkab dalam membeli alat tersebut. Sebab, persoalan sampah bukan hanya terjadi di Klungkung saja, namun juga di tingkat nasional. Apalagi untuk satu mesin pengolahan sampah hanya membutuhkan lahan sekitar empat are.

Sementara di Nusa Penida, persoalan sampah masih biasa diatasi. Hanya, sampah di Lembongan dan Jungutbatu perlu mendapatkan penanganan serius karena luas TPA di Jungutbatu hanya 1,2 hektar. Belum lagi kedua wilayah tersebut merupakan daerah pariwisata. (kmb)



Kondisi TPA Sente.

Bali Post/kmb

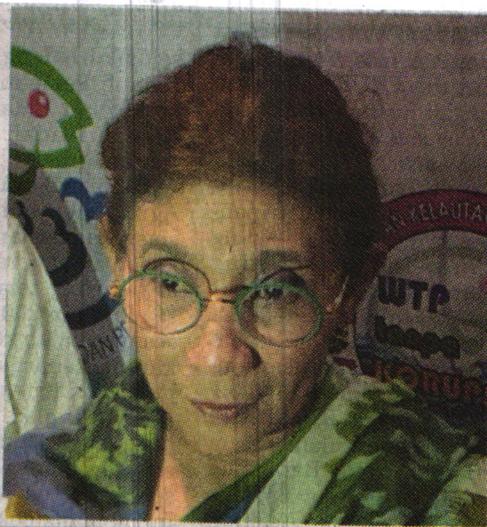


Reklamasi Teluk Benoa

Menteri Susi Belum Keluarkan Izin

"Pertanggung-jawaban kita sekarang sebagai pejabat maupun pribadi kepada anak-cucu kita kemudian. Bahwa reklamasi tidak bisa dilaksanakan tanpa ketentuan-ketentuan yang harus dihindari."

Susi Pudjiastuti



Badung (Bali Post) –

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyoroti soal reklamasi. Saat menjadi pembicara dalam "Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan" di Sunset Road, Kuta, Selasa (4/8) kemarin, Susi menyinggung soal rencana reklamasi Teluk Benoa.

Dalam sambutannya, ia mengatakan reklamasi pantai demi pertumbuhan properti, *aqua culture project* terbaru atau demi kebutuhan lahan untuk pembangunan memang sah-sah saja dilakukan. Namun, keberlanjutan ekosistem di sekitar lokasi reklamasi harus menjadi

tolok ukur pertama. Dengan kata lain, reklamasi harus memperhitungkan konsekuensi dan daya dukung alam.

"Semua tidak masalah, asal-kandengan catatan bahwa reklamasi itu mengubah peruntukan ruang, lalu gantinya di mana? Reklamasi Jakarta, misalnya, tanpa pembangunan dan rehabilitasi sungai hanya akan memperparah banjir di Jakarta. Pemerintah harus mempersiapkan dengan matang ke mana air dipindah. Persoalannya, reklamasi 1.000 hektar waduknya 100 hektar, yang 900 hektar volume air dikemanakan?" ujarnya.

Terkait persoalan ini, lanjut Susi, sistem seharusnya bisa

menjustifikasi, mengawal, dan menjadi pilar-pilar penjaga supaya developer tidak *cheating* wilayah air. Kemudian tidak boleh ada korupsi dalam sistem dan tidak boleh ada manipulasi data apa pun. Artinya, setiap kajian yang dilakukan harus akuntabel, objektif, dan bisa dipakai sebagai pertanggung-jawaban. "Pertanggungjawaban kita sekarang sebagai pejabat maupun pribadi kepada anak-cucu kita kemudian. Bahwa reklamasi tidak bisa dilaksanakan tanpa ketentuan-ketentuan yang harus dihindari," imbuhnya.

Hal. 19
Menjadi Polisi

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Menjadi Polisi ✓

Dari Hal. 1

Susi menambahkan, hanya mengeluarkan izin pelaksanaan untuk rencana reklamasi khususnya di Teluk Benoa. Sementara amdal dan izin lainnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia pun melihat persoalan baru dengan terlibatnya lebih dari satu kementerian menyangkut izin reklamasi. "Nanti tugas utama siapa yang akan menjadi polisi daripada pelaksanaan reklamasi itu sesuai atau tidak dengan kaidah-kaidah ekosistem yang harus terjaga. Ini persoalan baru lagi. Reklamasi boleh tetapi kalau reklamasinya tidak mengindahkan wilayah air, daya dukung air, akhirnya menimbulkan banjir," jelasnya.

Konsekuensi Alam

Usai menjadi pembicara, Susi kembali menegaskan kepada wartawan bila tidak ada persoalan dengan reklamasi selama ekosistem dan lingkungan dijaga dengan benar. Reklamasi akan mengambil wilayah air, berarti harus ada wilayah air alternatif sebagai

penampung air yang baru. "Jadi reklamasi boleh saja, mau bikin pelabuhan perlu reklamasi. Mau bikin daerah wisata perlu reklamasi, tetapi proses kajian dan pada pelaksanaan pembangunan itu tetap harus mengindahkan ekosistem. Ekosistem di sini adalah wilayah air, kalau tidak itu akan menimbulkan banjir. Kedua perubahan suhu, ini saya tadi lihat bakau-bakau itu dari atas, sudah banyak pengurangan-pengurangan kecil-kecil. Ini juga sangat membahayakan, semestinya bakau itu tidak boleh diuruk lagi. Bali ini sudah kehilangan 70 persen dari wilayah bakaunya," ujarnya.

Kendati ada penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh sebagian besar masyarakat Bali, Susi hanya mengatakan masih menunggu amdal dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu, Litbang di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sedang melakukan penelitian. Itu sebabnya, Susi mengaku belum mengeluarkan izin pelaksanaan lantaran masih menunggu kajian amdal. (kmb32)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 19



Siswa SMPN 1 Abang 1.034 Orang

Kekurangan

Sepuluh Ruang Belajar

Amlapura (Bali Post) -

SMPN 1 Abang di Dulunsampih, Desa Abang, Karangasem tergolong sekolah terbesar karena jumlah siswanya terbanyak di Karangasem. SMPN itu kini memiliki 1.034 orang siswa. Akibatnya, sekolah setempat kekurangan sepuluh ruang belajar.

Hal itu diakui Kepala SMPN 1 Abang Drs. I Wayan Sukardi, M.Si., Selasa (4/8) kemarin, di Karangasem. Dikatakan, siswa setempat total 30 rombongan belajar (rombel). Sementara, dari total 20 ruangan belajar

yang ada, yang dipakai belajar 17 buah. Tiga lagi dipakai ruang laboratorium. Dengan 30 rombel dan 20 ruang belajar, berarti untuk rombel saja kekurangan 10 ruang. "Jika ruang belajar tak dipakai lab, tentunya mesti punya ruang laboratorium tiga buah," paparnya.

Made Sukardi mengatakan siswa baru atau kelas VII yang diterima tahun ini di SMPN 1 Abang sebanyak 341 orang, siswa kelas VIII 348 orang, dan kelas IX sebanyak 345 orang. Karena kekurangan ruang belajar, lanjut Sukardi asal Desa

Abang itu, siswa terpaksa belajar dua *shift* yakni pagi dan sore. Di mana 15 rombel masuk pagi, dan 15 rombel lainnya masuk siang. "Kelas VII A-J serta kelas VIII F sampai J masuk siang," papar salah seorang guru setempat I Made Sweta, S.Pd.

Sweta mengatakan, banyaknya siswa setempat karena siswa berasal dari tujuh pebekelan. Siswa dari Desa Ababi, Tiyingtali, Abang, Pidpid, Desa Nawa Kerthi, dan Kesimpar Kelod bagian bawah, Tista dan Tribuana atau Basangalas juga banyak ke SMPN 1. Dikatakan

Sweta, memang SMPN 1 itu berada di tengah-tengah ketujuh wilayah desa dan banjar tersebut.

Sukardi mengatakan, pihaknya juga tak mungkin menolak siswa yang bersekolah ke SMPN 1 itu, apa pun alasannya. Soalnya, kini berlaku wajib belajar sembilan tahun dan semua lulusan SD mesti tertampung dan jangan sampai lulusan SD tak bisa bersekolah gara-gara tak ada ruang belajar atau ruang belajar sudah penuh. "Dari informasi di Disdikpora Karangasem, tahun

2015 ini, kami mendapatkan proyek rehabilitasi berat tiga lokal dan rehabilitasi ringan tiga lokal. Memang sampai saat ini belum tampak mulai pekerjaan, mudah-mudahan secepatnya proyek itu direalisasikan," paparnya.

Sukardi, para guru, serta pihak komite sekolah setempat berharap nantinya ada bantuan pemerintah lagi, untuk pembangunan ruang belajar. Selain itu, juga sekolah setempat belum memiliki ruang keterampilan untuk siswa belajar keterampilan. (013)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 13



Bali Post/ina

PEMADAM - Dua mobil pemadam kebakaran yang baru saat sedang diuji coba di lapangan Kapten Mudita.

Tangani Kebakaran Dua Unit Damkar Disiagakan di Kantor Camat Kintamani

Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam waktu dekat akan menyiagakan dua unit mobil pemadam kebakaran (damkar) lengkap dengan petugasnya di Kecamatan Kintamani. Hal itu dilakukan menyusul sudah adanya penambahan dua unit armada damkar, yang dibeli Pemkab Bangli dengan menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bangli Ida Bagus Wediatmika, Selasa (4/8) kemarin menjelaskan dua unit armada damkar yang baru tersebut dibeli dengan harga Rp 2,2 miliar. Adapun dana yang dipakai untuk membeli dua unit armada damkar tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang digelontor pemerintah pusat. Selain dua unit armada damkar, dengan dana DAK yang totalnya Rp 2,5 miliar, Pemkab juga membeli satu unit mobil tangki air seharga Rp 365 juta. Mobil tangki tersebut dibeli khusus untuk menunjang operasional armada damkar yang ada.

"Truk tangki ini khusus untuk menunjang armada damkar. Karena selama ini hydrant yang ada belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi ketika nanti petugas sedang memadamkan kebakaran di tempat-tempat yang kesulitan air, maka airnya bisa diambil dari truk tangki ini," terangnya. Dengan adanya

penambahan dua unit armada damkar sekarang, maka total armada damkar yang dimiliki sebanyak 4 unit. Sesuai rencana, dari empat unit armada damkar yang ada, dua di antaranya plus satu unit mobil tangki air akan disiagakan di Kantor Kecamatan Kintamani.

Armada yang disiagakan tersebut akan diprioritaskan untuk menangani bencana kebakaran di wilayah tersebut. "Rencananya satu unit armada damkar yang baru dan satu unit armada damkar yang lama akan kita siagakan di Kintamani. Sedangkan dua unit armada lainnya akan tetap kita siagakan di Pos Damkar Bangli," terangnya. Mengenai jumlah petugas yang akan ditugaskan di Kintamani, Wediatmika menyebutkan sebanyak 1 regu penuh atau sekitar 30 orang personel. Dalam sehari petugas tersebut akan dibagi dalam tiga shift. "Untuk tenaganya, sedang direkrut BKD," ujarnya.

Mantan Kadis Tata Kota ini menambahkan, dengan disiagakannya dua unit armada damkar di Kintamani, pihaknya berharap petugas Damkar Bangli bisa bergerak lebih cepat jika di wilayah tersebut sewaktu-waktu terjadi kebakaran. "Kalau sesuai standar pemadam kebakaran, 15 menit setelah adanya laporan dari masyarakat damkar harus sudah sampai di lokasi. Itulah tujuan kami menyiagakan dua unit damkar di sana," tandasnya. (kmb40)